

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-3 September 2021 (tanggal 10 s.d. 16 September)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Mohammad Teja
Peneliti Muda/Sosiologi
teja@dpr.go.id

SIAGA DAMPAK PELONGGARAN PPKM

ISU ATAU PERMASALAHAN

Temuan angka kasus penularan Covid-19 melandai, yang ditandai oleh tingkat keterisian rawat inap rumah sakit sebesar 7,35 kasus per 100.000 penduduk/minggu, penambahan kasus baru sebesar 14,7 kasus per 100.000 penduduk/minggu, dan tingkat kematian yang mencapai 1,19 kasus per 100.000 penduduk/minggu dengan rasio kasus positif mencapai 4,23% per minggu. Ini menunjukkan kondisi Indonesia sudah berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO yakni 5%.

Kementerian Kesehatan menyatakan masih mengamati tiga varian baru Covid-19 (Mu, Lambda, dan C12) sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Yang mengkhawatirkan, varian-varian baru ini mampu menghindari sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Untuk mengantisipasi masuknya varian baru tersebut dilakukan pencegahan melalui pintu-pintu masuk dan keluar internasional.

Selain fokus terhadapantisipasi masuknya varian baru, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak boleh lengah dengan penyebaran virus yang masih ada di dalam negeri, meskipun tren penurunannya signifikan sebagaimana tersebut di atas. Bersamaan dengan itu Menteri Kesehatan menyatakan, hingga 12 September hasil scan aplikasi pedulilindungi menunjukkan adanya sekitar 3.830 orang yang termasuk dalam kategori hitam berkeliaran, dan yang terbanyak terdeteksi adalah mereka yang masuk mall (3.161 orang).

Penting untuk diwaspadai dampak dari pelanggaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah. Seharusnya aktivitas ekonomi dan ruang publik dibuka dengan terbatas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Terlebih di lokasi tertentu ada masyarakat yang beranggapan bahwa pandemi ini sudah selesai ditandai yang dengan menurunnya penegakan protokol kesehatan.

Indikator lainnya dapat dilihat dengan sudah mulainya beroperasi/uji coba dibukanya tempat-tempat wisata, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Potensi kerumunan di tempat wisata sangat mungkin terjadi dan penyebaran virus Covid pun menjadi besar peluangnya. Dalam hal ini peran aplikasi pedulilindungi sangatlah penting untuk diandalkan.

Karena Pemerintah mensyaratkan masyarakat dalam berkegiatan di ruang publik menggunakan aplikasi pedulilindungi, pemerintah baik di pusat maupun daerah selain harus terus melakukan pengawasan protokol kesehatan, *tracking* dan *testing* Covid-19, juga perlu terus memperbaiki fungsi, kemudahan dan keamanan penggunaan aplikasi pedulilindungi. Misalnya dengan menyiapkan infrastruktur pendukung di tempat umum untuk masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap aplikasi pedulilindungi tersebut.

Pemerintah juga harus membenahi pendataan masyarakat yang belum atau masih bermasalah (tidak terdaftar dalam sistem pedulilindungi). Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) yang belum mendapatkan izin untuk divaksinasi, sehingga mereka juga perlu dipikirkan jalan keluarnya agar dapat ikut mengakses ruang publik dengan baik, aman dan terlindungi.

SUMBER

kompas, 14 & 16 September 2021; republika, 14 & 15 September 2021; kompas.com, 15 September 2021.